



Dari Weber Ke New Public Service : Evolusi Paradigma Administrasi Publik Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Didin Halim¹, Herman H², Adelia Ramadani³, Nurul Amalia Arif⁴, Alya Oktavina Nur Alam⁵, Putri Amalia Ilyas⁶

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

Email Korespondensi: didinhalim@unm.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 02 Desember 2025

ABSTRACT

Public Administration is a discipline that continues to develop in line with social, political, and technological changes. These changes are reflected in the evolution of paradigms that underlie the practice and thought of public administration. The Weberian paradigm emphasizes rationality, hierarchy, and adherence to rules. In the 1980s, the New Public Management (NPM) paradigm highlighted efficiency and private-sector managerial principles. Subsequently, the New Public Service (NPS) paradigm focused on democracy, ethics, participation, and fairness in public service. This article aims to explore the evolution of these three paradigms through a philosophical approach, covering aspects of ontology, epistemology, and axiology. The method used is a qualitative comparative study, utilizing secondary literature sources such as scholarly articles, books, and previous research. The results of the study indicate that the paradigm shift from Weberian to NPM, and then to NPS, not only reflects changes in the way bureaucracy is managed but also demonstrates a transformation in the fundamental values of public administration from an orientation toward efficiency to an orientation toward ethics, collaboration, and service to citizens.

Keywords: Public Administration; Philosophy of Science; Weberian; New Public Management; New Public Service

ABSTRAK

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Perubahan tersebut tercermin dalam evolusi paradigma yang mendasari praktik dan pemikiran administrasi publik. Paradigma Weberian menekankan rasionalitas, hierarki, dan kepatuhan aturan. Pada 1980-an, New Public Management menonjolkan efisiensi dan prinsip manajerial swasta. Selanjutnya, New Public Service berfokus pada demokrasi, etika, partisipasi, dan keadilan pelayanan publik. Artikel ini bertujuan untuk menelusuri evolusi ketiga paradigma tersebut melalui pendekatan filsafat ilmu, mencakup aspek ontology, epistemology, dan aksiologi. Metode yang digunakan adalah studi komparatif kualitatif, dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma dari Weberian ke NPM, dan kemudian ke NPS, tidak hanya merefleksikan perubahan dalam cara mengelola birokrasi, tetapi juga menunjukkan pergeseran dalam nilai-nilai dasar administrasi publik dari orientasi pada efisiensi menuju orientasi pada etika, kolaborasi, dan pelayanan bagi warga negara

Kata Kunci: *Administrasi Publik; Filsafat Ilmu; Weberian; New Public Management; New Public Service*

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang senantiasa berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi. Dinamika masyarakat modern, tuntutan pemerintahan yang lebih efektif, serta kompleksitas masalah publik menuntut adaptasi konsep, teori, dan praktik administrasi publik agar tetap relevan. Dalam era yang terus bergerak cepat ini, kebutuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik semakin meningkat. Administrasi publik tidak lagi sekadar dipahami sebagai urusan birokrasi atau pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai wujud dari hubungan antara negara dan warganya dalam mengelola kepentingan bersama. Menurut Henry (2013), administrasi publik tidak hanya sekadar mekanisme birokrasi, tetapi juga mencakup pemikiran konseptual dan filosofis yang menuntun pengelolaan organisasi publik dalam menghadapi perubahan zaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak statis, melainkan berkembang sebagai disiplin ilmu terapan yang menggabungkan prinsip-prinsip sosial, politik, dan manajerial.

Pada awal, Sejarah perkembangan administrasi publik menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang mencerminkan perubahan cara pandang terhadap manusia, organisasi, dan kekuasaan. Administrasi publik berlandaskan pada rasionalitas birokratis *Weberian*. Max Weber (1978) menekankan pentingnya struktur hierarkis, aturan formal, dan pembagian kerja yang jelas sebagai landasan efisiensi dan keteraturan dalam organisasi publik. Birokrasi *Weberian* menempatkan manusia sebagai aktor yang tunduk pada aturan (*homo bureaucraticus*), dengan tujuan utama menciptakan kepastian hukum, stabilitas organisasi, dan efektivitas procedural (Shafritz & Hyde, 2016).

Pendekatan ini dianggap mampu menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam konteks masyarakat yang masih sederhana. Namun, seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan publik, model birokrasi tradisional mulai dianggap kaku dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Paradigma ini dikenal sebagai *Old Public Administration (OPA)*, yang lebih menekankan aspek formal dan mekanistik daripada nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik. Namun, konsep administrasi publik yang dikemukakan oleh *Weber* tidak selalu dapat diterapkan secara menyeluruh maupun sesuai dengan konteks lokal dalam menangani persoalan administrasi publik di berbagai wilayah, baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari negara lain, baik dari aspek sosial kemasyarakatan, keragaman suku bangsa, adat istiadat, kondisi geografis, maupun keberagaman budayanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma administrasi publik mengalami pergeseran menuju *New Public Management (NPM)* yang muncul pada era 1980–1990-an. Paradigma ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi

pada hasil (output-oriented) sebagai respons terhadap kritik terhadap birokrasi yang terlalu kaku dan lamban (Hood, 1991; Osborne, D., & Gaebler, 1992). Paradigma *NPM* berasumsi bahwa penerapan mekanisme insentif, seperti kompetisi pasar dan penghargaan berbasis kinerja, dapat meningkatkan akuntabilitas serta memperbaiki sistem birokrasi yang kaku pada model Administrasi Publik tradisional. Pendekatan *NPM* bertujuan agar kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada manajemen dan keuangan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Selain itu, *NPM* juga memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti desentralisasi, kompetisi antarorganisasi, dan akuntabilitas berbasis kinerja. Dalam perspektif filsafat ilmu, *NPM* menekankan epistemologi praktis, di mana pengetahuan administrasi publik dibangun melalui mekanisme manajerial dan kinerja organisasi, sementara orientasi nilai (aksiologi) menitikberatkan pada produktivitas dan efisiensi.

Kemudian, muncul paradigma *New Public Service* (NPS) yang menekankan pelayanan publik berbasis nilai, etika, dan partisipasi warga negara sebagai mitra aktif dalam proses pemerintahan. Paradigma ini berupaya mengembalikan orientasi pelayanan publik kepada nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan partisipasi. Denhardt, J. V., & Denhardt, (2023) menegaskan bahwa aparat pemerintah tidak sekadar mengendalikan masyarakat (*steering*), tetapi melayani kepentingan publik (*serving*), mengutamakan partisipasi warga, demokrasi, dan tanggung jawab etis. Paradigma ini merupakan respons terhadap keterbatasan *NPM* yang terlalu fokus pada output dan manajerialisme, sehingga mengabaikan dimensi kemanusiaan dalam administrasi publik. Diharapkan negara dapat berkembang lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Dari pandangan tersebut muncul pemahaman bahwa pemerintahan tidak dapat disamakan dengan sektor swasta karena memiliki tujuan berbeda: sektor publik berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sektor swasta berfokus pada keuntungan. Perbedaan ini kemudian melahirkan paradigma baru dalam administrasi publik, yaitu *New Public Service*. Dari perspektif filsafat ilmu, *NPS* menekankan ontologi humanistik, epistemologi reflektif dan partisipatif, serta aksiologi berbasis nilai sosial dan etika publik (Frederickson, 1997). Evolusi paradigma tersebut menunjukkan perubahan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik. Jika sebelumnya berlandaskan pendekatan klasik, kini berkembang menuju paradigma yang menekankan inklusivitas, responsivitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan.

Dengan demikian, evolusi paradigma administrasi publik dari *Weberian*, *NPM*, hingga *NPS* mencerminkan pergeseran konseptual dan filosofis dalam memahami hakikat administrasi publik. Filsafat ilmu berperan penting dalam menelaah evolusi ini, melalui tiga dimensi utama: *ontologi*, yang menelusuri hakikat manusia dan organisasi; *epistemologi*, yang menelaah cara memperoleh pengetahuan administrasi; dan *aksiologi*, yang menilai nilai-nilai dan tujuan yang mendasari praktik administrasi (Muhadjir, 2011).

Melalui kajian filsafati, evolusi dari paradigma birokratis menuju *NPM* dan akhirnya *NPS* dapat dipahami bukan hanya sebagai perubahan teknis, tetapi sebagai

transformasi cara berpikir tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk melayani masyarakat secara manusiawi dan berkeadilan.

Dengan demikian, penting untuk menelaah perkembangan administrasi publik dari perspektif filsafat ilmu agar dapat memahami hakikat dan arah perkembangannya secara lebih mendalam. Pendekatan ini tidak hanya membantu menguraikan perubahan konsep dan praktik administrasi, tetapi juga mengungkap nilai-nilai dasar yang membentuk orientasi baru dalam pelayanan publik di era modern.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Danandjaja dalam Supriyadi (2021), Dijelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian bibliografi yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis, mencakup pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, penggunaan teknik pengumpulan data berbasis literatur, serta pengelolaan dan penyajian data secara terstruktur. Metode ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau pengumpulan data primer, melainkan melalui analisis terhadap data dan sumber-sumber yang sudah ada. Pendekatan studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori serta paradigma administrasi publik dari sudut pandang filsafat ilmu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Sumber primer, yaitu buku-buku dan karya ilmiah yang membahas secara langsung konsep *Weberian Bureaucracy*, *New Public Management (NPM)*, dan *New Public Service (NPS)*. Selain itu, ada dari Sumber sekunder, berupa jurnal ilmiah, laporan akademik, serta publikasi lembaga pemerintahan yang relevan dengan evolusi administrasi publik dan penerapannya di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif-filosofis. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan tiga paradigma utama administrasi publik berdasarkan dimensi *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi*, kemudian menafsirkan maknanya dalam konteks perkembangan nilai-nilai dan praktik administrasi publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan perbedaan mendasar antara setiap paradigma serta arah perkembangan administrasi publik ke depan. Adapun langkah-langkah analisis meliputi, Inventarisasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, Klasifikasi data berdasarkan paradigma dan dimensi filsafat ilmu, Analisis perbandingan untuk melihat hubungan dan perbedaan antarparadigma, Interpretasi makna filosofis terhadap arah perubahan nilai dalam administrasi publik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai evolusi administrasi publik bukan hanya sebagai perubahan sistem manajerial, tetapi sebagai transformasi nilai dan cara berpikir dalam konteks filsafat ilmu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma yang terjadi seiring perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Setiap paradigma membawa landasan filosofis yang berbeda, baik dalam cara memandang manusia, struktur pemerintahan, maupun nilai-nilai yang mendasarinya. Dengan menggunakan perspektif filsafat ilmu, analisis ini membandingkan tiga paradigma utama administrasi publik yakni *Weberian Bureaucracy*, *New Public Management (NPM)*, dan *New Public Service (NPS)* berdasarkan dimensi *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi*.

Paradigma 1: Weberian (Old Public Administration) (1800 - 1970)

Paradigma Weberian lahir dari kebutuhan akan pemerintahan yang stabil, rasional, dan teratur. Dalam konteks sejarahnya, paradigma ini berkembang pada masa industrialisasi di Eropa, ketika organisasi publik harus dikelola secara efisien dan disiplin untuk menjaga keteraturan sosial.

Dari sisi *ontologi*, paradigma *Weberian* memandang manusia sebagai bagian dari sistem yang harus tunduk pada aturan dan hierarki. Manusia dalam organisasi publik berperan sebagai pelaksana tugas yang mengikuti perintah struktural, bukan sebagai individu yang bebas berinisiatif. Administrasi dipahami sebagai sistem rasional-legal, di mana realitas organisasi dibangun berdasarkan hukum dan prosedur formal.

Secara *epistemologis*, pengetahuan administrasi pada masa ini diperoleh melalui aturan, standar, dan prosedur baku. Rasionalitas yang digunakan bersifat formal dan legalistik, sehingga segala sesuatu harus dapat dijelaskan melalui regulasi tertulis. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara impersonal, dengan menghindari faktor subjektivitas dan emosi pribadi.

Sementara dalam *aksiologi*, paradigma *Weberian* menempatkan kepatuhan, keteraturan, dan stabilitas sebagai nilai tertinggi. Efisiensi dalam pelaksanaan tugas dipandang sebagai ukuran utama keberhasilan birokrasi. Namun, orientasi nilai ini sering kali membuat birokrasi menjadi kaku, lambat, dan tidak responsif terhadap perubahan sosial yang cepat.

Paradigma 2: New Public Management (NPM) (1980 - 1990)

Paradigma *NPM* muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap kelemahan birokrasi tradisional yang dianggap terlalu lamban dan tidak efisien. Pendekatan ini berupaya mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, dengan menekankan kinerja, hasil, dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dari sisi *ontologi*, manusia dalam paradigma *NPM* dipandang sebagai aktor rasional (*homo economicus*) yang bertindak berdasarkan kepentingan dan tujuan pribadi. Administrasi publik dilihat sebagai sistem yang berorientasi pada hasil (*output-oriented*) dan nilai ekonomi. Realitas organisasi dianggap sebagai entitas yang dinamis dan kompetitif, di mana efisiensi menjadi tujuan utama.

Secara *epistemologis*, NPM menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis kinerja dan hasil terukur. Pengetahuan administrasi bersumber dari praktik manajerial, data kuantitatif, serta analisis ekonomi. Pemerintah berperan sebagai “pengarah” (*steering*) yang memastikan sektor publik berjalan dengan efisien melalui kontrak kerja, indikator kinerja, dan kompetisi antarinstansi.

Dalam *aksiologi*, nilai utama yang diusung paradigma ini adalah efisiensi, efektivitas, dan orientasi pelanggan (*customer orientation*). Pelayanan publik dianggap berhasil jika mampu memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial, sehingga muncul kritik bahwa NPM mengubah warga negara menjadi sekadar “pelanggan,” bukan mitra dalam membangun pemerintahan yang demokratis.

Paradigma 3: New Public Service (NPS) (2000 – Kini)

Paradigma NPS lahir sebagai koreksi terhadap keterbatasan pendekatan NPM yang terlalu berorientasi pada pasar dan efisiensi. Paradigma ini memandang bahwa tugas utama pemerintah bukan sekadar mengarahkan (*steering*), tetapi melayani kepentingan publik secara partisipatif dan etis.

Dari sudut pandang *ontologi*, manusia dalam NPS dipahami sebagai warga negara (*citizen*) yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kapasitas moral untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Realitas administrasi publik tidak lagi dilihat sebagai struktur kaku, melainkan sebagai ruang interaksi sosial di mana nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kolaborasi menjadi dasar hubungan antara negara dan masyarakat.

Secara *epistemologis*, paradigma NPS menekankan pentingnya dialog dan kolaborasi dalam memperoleh pengetahuan administrasi. Pengetahuan tidak hanya berasal dari pejabat atau ahli, tetapi juga dari pengalaman kolektif masyarakat. Pendekatan ini menggunakan pengetahuan reflektif dan partisipatif, di mana kebijakan publik dibangun melalui komunikasi terbuka dan saling belajar antara pemerintah dan warga.

Dalam aksiologi, paradigma NPS mengutamakan nilai-nilai etika, tanggung jawab publik, keadilan sosial, dan partisipasi warga. Keberhasilan administrasi publik tidak lagi diukur hanya dari efisiensi atau hasil ekonomi, tetapi dari sejauh mana kebijakan dan pelayanan mampu menciptakan kesejahteraan bersama dan memperkuat nilai kemanusiaan. Paradigma ini menempatkan pelayanan publik sebagai tindakan moral yang berorientasi pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Analisis Komparatif Filsafati

Perbandingan antara ketiga paradigma tersebut dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Dimensi Filsafat Ilmu	Weberian (OPA)	New Public Management (NPM)	New Public Service (NPS)
<i>Ontologi</i>	Manusia sebagai alat birokrasi (mekanistik)	Manusia sebagai aktor rasional dan ekonomis	Manusia sebagai warga negara partisipatif
<i>Epistemologi</i>	Pengetahuan formal dan prosedural	Pengetahuan manajerial dan berbasis kinerja	Pengetahuan reflektif dan dialogis

<i>Aksiologi</i>	Keteraturan, kepatuha, stabilitas	Efisiensi, efektivitas, kompetisi	Keadilan, etika, pelayanan, partisipasi
------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

Dari tabel tersebut terlihat bahwa perubahan paradigma administrasi publik sejatinya merupakan transformasi filosofis yang sangat mendasar. Jika paradigma *Weberian* berorientasi pada struktur dan hukum, maka *NPM* bergeser ke orientasi ekonomi, dan *NPS* menuju orientasi nilai dan kemanusiaan. Evolusi ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara filosofis, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai moral, etika, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

SIMPULAN

Perkembangan administrasi publik menunjukkan bahwa disiplin ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengalami perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pemerintahan dan manusia. Tiga paradigma utama *Weberian Bureaucracy*, *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS)—merepresentasikan evolusi filosofis dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Paradigma *Weberian* menekankan rasionalitas birokrasi, keteraturan, dan kepatuhan hukum, dengan manusia diposisikan sebagai bagian dari sistem mekanistik. NPM kemudian menghadirkan reformasi dengan fokus pada efisiensi dan kinerja, namun cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan karena warga negara diperlakukan seperti pelanggan. Sebagai koreksi, NPS mengedepankan demokrasi, etika, dan partisipasi publik, menempatkan warga sebagai mitra aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara filosofis, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari rasionalitas mekanistik menuju humanistik. Ontologi administrasi publik kini mencakup dimensi moral dan sosial; epistemologinya berbasis refleksi dan dialog; sementara aksiologinya menekankan keadilan, partisipasi, dan etika pelayanan.

Dalam konteks Indonesia, paradigma NPS sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat birokrasi yang etis, demokratis, dan berkeadaban. Karena itu, reformasi birokrasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada penguatan moralitas, transparansi, serta keterlibatan masyarakat. Pendidikan dan penelitian administrasi publik pun perlu menanamkan pendekatan filosofis agar kebijakan publik tidak sekadar rasional secara teknis, tetapi juga bermakna secara sosial. Dengan demikian, inti administrasi publik bukanlah sekadar mengatur, melainkan melayani dengan nilai dan memanusiakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2023). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Hakim, A. A., & Saebani, B. A. (2008). *Filsafat Umum Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia. Hal 22
- Henry, N. (2013). *Public administration and public affairs*. Pearson.

- Hood, C. (1991). "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- Marliani, L., Henriyani, E., & Djadjuli, R. D. (2025). PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM TEORI DAN PRAKTEK. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).
- Muhadjir, N. (2011). *Filsafat Ilmu: Kajian atas Dasar Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*. Rake Sarasin.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Puspawati, A. (2016). PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DI INDONESIA (*Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik* (1(1)). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*
- Rahim, R. K., & Adnan, M. F. (2023). TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT : EVALUASI DAN TANTANGAN DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2).
- Saputra, B., Suropto, & Chrisdiana, Y. (2018). INDIGENEOUS PUBLIC ADMINISTRATION: MELIHAT ADMINISTRASI PUBLIK DARI PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 278–292.
- Shafritz, J. M., & Hyde, A. C. (2016). *Classics of Public Administration* (8th ed.). Cengage Learning.
- Sudarminta, J. (2002). *Epistimologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta:Kansius. Hal 19
- Supriyadi, E. I. (2021). PERGESERAN DALAM PARADIGMA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK. *JURNAL SOSIAL DAN HUMANIORA*, 3(1), Hal. 9-16.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Univ of California Press. <https://doi.org/9780520028241>.